

REFORMASI KURIKULUM DALAM KONTEKS DESENTRALISASI: ANALISIS KRITIS TERHADAP TIGA STUDI TERKAIT

Bunyamin¹, Nama_2 Eko Handoyo²

¹PPS UNNES Semarang, ²PPS UNNES Semarang

Alamat e-mail : [1bunyamin91@guru.sma.belajar.id](mailto:bunyamin91@guru.sma.belajar.id),

ABSTRACT

*Curriculum change responds to global challenges and local demands for improving education quality. In Indonesia, the Merdeka Curriculum reflects a reform initiative focusing on flexibility, differentiated learning, and the development of character and 21st-century competencies. However, its implementation faces various obstacles, particularly within decentralized education systems. This study aims to critically examine curriculum change dynamics using a qualitative approach through a literature review method. Three core articles were analyzed: *ICT and Curriculum Change* (Voogt & Pelgrum, 2005), *Curriculum Reform in Indonesia* (Simarmata & Mayuni, 2023), and *Curriculum Reform in the Decentralization of Education in Indonesia* (Dewi, 2021). Thematic content analysis was applied to explore background issues, implementation strategies, and the challenges and implications of curriculum reform. The findings reveal a significant gap between policy and practice, as well as disparities in regional capacities that hinder effective reform. Strengthening synergy among curriculum design, teacher training, local institutional capacity, and adaptive evaluation is essential to ensure meaningful educational transformation in Indonesia.*

Keywords: *curriculum reform, decentralization, Merdeka Curriculum*

ABSTRAK

Perubahan kurikulum merupakan respons terhadap tantangan global dan kebutuhan lokal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di Indonesia, Kurikulum Merdeka hadir sebagai bentuk reformasi yang menekankan fleksibilitas, pembelajaran berdiferensiasi, serta penguatan karakter dan kompetensi abad ke-21. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan dalam konteks desentralisasi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dinamika perubahan kurikulum melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Tiga artikel utama dijadikan sumber data: *ICT and Curriculum Change* (Voogt & Pelgrum, 2005), *Curriculum Reform in Indonesia* (Simarmata & Mayuni, 2023), dan *Curriculum Reform in the Decentralization of Education in Indonesia* (Dewi, 2021). Analisis dilakukan menggunakan teknik *thematic content analysis* untuk mengeksplorasi isu-isu seperti latar belakang perubahan, strategi implementasi, serta tantangan dan implikasi reformasi kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, serta ketimpangan kapasitas antarwilayah yang menghambat efektivitas reformasi. Diperlukan sinergi antara perumusan kebijakan, pelatihan guru, penguatan kelembagaan daerah, dan evaluasi adaptif agar reformasi kurikulum benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: *reformasi kurikulum, desentralisasi, Kurikulum Merdeka*

A. Pendahuluan

Perubahan kurikulum merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan sistem pendidikan yang dinamis. Kurikulum sebagai suatu sistem terstruktur berfungsi bukan hanya sebagai rencana pembelajaran, tetapi juga sebagai representasi nilai, harapan, dan tujuan suatu bangsa terhadap masa depan generasinya (Tyler, 1949). Dalam era transformasi digital, kebutuhan terhadap kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, literasi informasi, dan digitalisasi menjadi mendesak untuk diintegrasikan ke dalam struktur kurikulum.

Voogt dan Pelgrum (2005) dalam *ICT and Curriculum Change* menekankan bahwa perubahan dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi telah memunculkan tuntutan terhadap kompetensi baru, yang tidak cukup dijawab oleh kurikulum konvensional. Mereka menyoroti adanya gap antara kurikulum yang dirancang (intended), yang dilaksanakan (implemented), dan yang dicapai (attained),

sebagaimana juga digambarkan oleh Van den Akker (2003) dalam kerangka "curriculum spider web" miliknya, yang memetakan unsur-unsur saling terkait dalam proses perubahan kurikulum.

Di Indonesia, perubahan kurikulum dari pendekatan berbasis konten menuju pendekatan berbasis kompetensi dan karakter menjadi upaya besar untuk merespon kebutuhan tersebut. Dalam artikelnya *Curriculum Reform in Indonesia: From Competency-Based to Freedom of Learning*, Simarmata dan Mayuni (2023) menyoroti bahwa Kurikulum Merdeka hadir untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai konteks. Namun, fleksibilitas tersebut tidak selalu mudah diterapkan mengingat tantangan struktural dan kesiapan sumber daya yang bervariasi.

Lebih lanjut, Dewi (2021) dalam kajiannya tentang *Curriculum Reform in the Decentralization of Education in Indonesia* menegaskan bahwa reformasi kurikulum yang dilakukan dalam konteks desentralisasi pendidikan justru menghadirkan

kompleksitas baru. Dengan menggunakan teori desentralisasi dari Bray (1996), Dewi mengungkap bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus diimbangi dengan dukungan kapasitas kelembagaan agar tidak memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah.

Dalam memaknai perubahan kurikulum, pendekatan klasik dari Ralph Tyler (1949) menempatkan kurikulum sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, melalui seleksi konten, kegiatan belajar, dan evaluasi. Namun, pendekatan modern menekankan pentingnya fleksibilitas dan kebermaknaan dalam pembelajaran. Van den Akker (2003) melalui model "curriculum spider web"-nya menegaskan bahwa semua komponen kurikulum—tujuan, konten, strategi, peran guru, sumber daya, dan evaluasi—harus selaras agar implementasi kurikulum berhasil. Ketidakseimbangan dalam satu elemen dapat menghambat pencapaian hasil belajar yang diharapkan.

Selain itu, teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky (1978) juga memberikan penguatan bahwa

pembelajaran yang efektif terjadi melalui interaksi sosial dan konteks nyata. Oleh karena itu, kurikulum harus memberi ruang bagi peserta didik untuk menjadi subjek aktif dalam membangun pengetahuan. Hal ini sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi, berbasis proyek, serta penguatan karakter dan kompetensi abad ke-21. Dalam konteks desentralisasi pendidikan, seperti dikemukakan Bray (1996), otonomi lokal dalam implementasi kurikulum memerlukan dukungan sistemik agar kesenjangan mutu antarwilayah dapat diminimalkan.

Berdasarkan kerangka tersebut, permasalahan dalam artikel ini difokuskan pada bagaimana dinamika perubahan kurikulum dalam konteks Indonesia—khususnya Kurikulum Merdeka—berinteraksi dengan konteks desentralisasi pendidikan, serta bagaimana implementasinya dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menelaah secara kritis literatur terkait perubahan kurikulum, baik dari perspektif global maupun nasional,

serta mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasi kurikulum berbasis kebebasan belajar.

Manfaat kajian ini adalah memperkuat pemahaman teoretis mengenai reformasi kurikulum dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika lokal serta tuntutan global.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis secara kritis berbagai literatur akademik mengenai perubahan kurikulum, baik dalam lingkup global maupun nasional. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap gagasan, teori, dan temuan penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika reformasi kurikulum.

Data utama dalam kajian ini diperoleh dari tiga artikel ilmiah yang telah dipublikasikan di jurnal bereputasi: (1) *ICT and Curriculum Change* oleh Voogt dan Pelgrum

(2005), diterbitkan dalam *Human Technology Journal* (DOI: <https://doi.org/10.17011/ht/urn.2005356>), (2) *Curriculum Reform in Indonesia: From Competency-Based to Freedom of Learning* oleh Simarmata dan Mayuni (2023), diterbitkan di *International Journal of Pedagogical Novelty* (<https://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/IJOPNOV/article/view/109>), dan (3) *Curriculum Reform in the Decentralization of Education in Indonesia* oleh Dewi (2021), yang dimuat dalam *Cakrawala Pendidikan* (DOI: <https://doi.org/10.21831/cp.v40i1.33821>). Selain itu, digunakan pula literatur pendukung berupa buku teoretis dan jurnal akademik lainnya yang relevan.

Analisis dilakukan dengan teknik *thematic content analysis* terhadap dokumen-dokumen yang dikaji, untuk mengidentifikasi tema utama seperti latar belakang perubahan kurikulum, teori yang mendasari, strategi implementasi, serta dampaknya terhadap mutu pendidikan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan pemilihan referensi dari literatur yang telah melalui proses *peer review*. Hasil

analisis kemudian disusun secara naratif dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap konteks pendidikan di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Temuan Utama

Kajian terhadap ketiga artikel menunjukkan bahwa perubahan kurikulum merupakan respons terhadap tekanan global dan lokal, serta refleksi dari orientasi pendidikan ke masa depan. Voogt dan Pelgrum (2005) mengkaji transformasi kurikulum di 28 negara dan menyimpulkan bahwa kurikulum tradisional yang berfokus pada penguasaan konten sudah tidak lagi memadai dalam menghadapi tantangan masyarakat informasi. Mereka menekankan bahwa integrasi TIK dalam pembelajaran belum secara substansial mengubah isi kurikulum, tetapi lebih banyak berdampak pada cara

penyampaiannya. Tantangan utama yang ditemukan adalah adanya ketimpangan antara kurikulum yang dirancang oleh pembuat kebijakan dan pelaksanaannya oleh guru, serta kurangnya dukungan sistemik terhadap perubahan pedagogis yang berbasis kompetensi dan digital.

Sementara itu, artikel oleh Simarmata dan Mayuni (2023) membahas dinamika perubahan kurikulum di Indonesia dari kurikulum berbasis kompetensi menuju Kurikulum Merdeka. Mereka menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dalam pembelajaran dan pergeseran orientasi dari "teaching to the test" menjadi pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Kurikulum Merdeka memberi kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Namun, dalam pembahasan mereka, muncul kritik bahwa pelaksanaan kurikulum ini masih menghadapi kendala dalam hal kesiapan sumber daya manusia, perbedaan pemahaman antarguru, serta terbatasnya sarana dan

prasarana di sekolah, khususnya di daerah tertinggal.

Dari sisi kebijakan dan dampaknya terhadap capaian belajar, Dewi (2021) menganalisis bagaimana reformasi kurikulum yang diimplementasikan dalam kerangka desentralisasi pendidikan belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui data Indonesian Family Life Survey (IFLS), ia menemukan bahwa meskipun pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar dalam mengelola pendidikan, belum ada dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Ini disebabkan oleh ketimpangan antarwilayah dalam hal kapasitas kelembagaan, kualitas guru, serta infrastruktur sekolah. Temuan ini menguatkan pandangan Bray (1996) bahwa desentralisasi tanpa disertai peningkatan kapasitas institusional justru dapat memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Ketiga artikel tersebut memperlihatkan keterkaitan yang erat antara dimensi kebijakan makro dan implementasi mikro dalam reformasi kurikulum. Model *curriculum spider web* yang dikembangkan Van den

Akker (2003) menjadi kerangka teoritik yang relevan untuk membaca kompleksitas ini. Ketidaksinkronan antara elemen kurikulum seperti tujuan, isi, strategi pembelajaran, peran guru, dan penilaian menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Meskipun kurikulum telah berubah dari segi dokumen, namun praktik pembelajaran di kelas cenderung masih bersifat konvensional. Ini menunjukkan pentingnya kesinambungan antara desain kurikulum dengan pelatihan guru, pengembangan perangkat ajar, dan penguatan manajemen sekolah.

2. Implikasi terhadap Pendidikan

Implikasi dari temuan ini terhadap kondisi pendidikan di Indonesia saat ini cukup signifikan. Penerapan Kurikulum Merdeka, yang secara resmi diperluas pada tahun 2022, masih menghadapi resistensi dan kesenjangan implementasi yang tinggi, terutama di luar Pulau Jawa. Hal ini mempertegas perlunya penguatan kebijakan afirmatif dalam pengembangan sumber daya pendidikan daerah. Selain itu, perlu adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang adaptif, bukan hanya

bersifat administratif, melainkan juga mampu menangkap dinamika praktik belajar-mengajar di kelas. Transformasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dari transformasi budaya sekolah dan penguatan peran guru sebagai agen utama perubahan.

Lebih jauh lagi, kajian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dalam konteks desentralisasi, reformasi kurikulum perlu mempertimbangkan karakteristik lokal secara serius. Kurikulum sebaiknya tidak hanya mengadopsi nilai-nilai global, tetapi juga relevan dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing daerah. Ini sejalan dengan gagasan *glocalization* dalam pendidikan, yaitu menggabungkan standar global dengan pendekatan lokal. Oleh karena itu, strategi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Indonesia harus difokuskan pada peningkatan kompetensi guru, kolaborasi antarwilayah, dan penguatan kepemimpinan instruksional di sekolah.

Tabel 1.
Perbandingan Isi Tiga Artikel Terkait Perubahan Kurikulum

Aspek	Voogt & Pelgru m (2005)	Simar mata & Mayun i (2023)	Dewi (2021)
Konteks Penelitian	Global (28 negara)	Indonesia, pasca pandemi	Indonesia, pasca reformasi dan desentralisasi pendidikan
Fokus Kajian	Integrasi ICT dan lifelong learning dalam perubahan kurikulum	Implementasi Kurikulum Merdeka dan fleksibilitas pembelajaran	Pengaruh desentralisasi terhadap capaian siswa
Pendekatan/Metode	Kualitatif – studi kasus antar negara	Kualitatif – analisis kebijakan dan isi kurikulum	Kuantitatif – analisis data IFLS (propensity score matching)
Teori Pendukung	Constructivism, Curriculum implementation theory	Student-centered learning, Merdeka Belajar framework	Desentralisasi (Bray), ketimpangan wilayah
Tantangan yang Ditemukan	Kesenjangan antara rancangan dan pelaksanaan kurikulum	Kesiapan guru dan fasilitas yang belum merata	Tidak meratanya hasil belajar akibat ketimpangan

			sumber daya
Implikasi bagi Pendidikannya	Butuh keseimbangan elemen kurikulum dan pelatihan guru	Perluanya penguatan SDM dan model implementasi kontekstual	Kebutuhan penguatan kelembagaan dan sistem monitoring daerah

3. Implikasi Terhadap Kebijakan

Reformasi kurikulum di Indonesia dan berbagai negara menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan respons kebijakan multidimensi. Studi terhadap tiga artikel utama ini mengungkap bahwa keberhasilan perubahan kurikulum tidak hanya bergantung pada desain dokumen kurikulum itu sendiri, tetapi lebih pada faktor-faktor pendukung di tingkat implementasi. Berdasarkan temuan Voogt dan Pelgrum (2005), Dewi (2021), serta Simarmata dan Mayuni (2023), setidaknya terdapat empat aspek kebijakan kritis yang perlu diperhatikan untuk memastikan transformasi kurikulum berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pertama, penguatan kapasitas guru harus menjadi prioritas utama dalam reformasi kurikulum. Pelatihan guru tidak hanya perlu fokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga

pada pedagogi inovatif yang mendukung pembelajaran berbasis kompetensi dan berpusat pada siswa. Seperti yang ditunjukkan Voogt dan Pelgrum (2005), integrasi TIK dalam pembelajaran seringkali gagal mengubah praktik pedagogis karena guru cenderung menggunakan teknologi dengan pendekatan konvensional. Oleh karena itu, program pengembangan profesional guru harus dirancang secara berkelanjutan dan kontekstual, mencakup pelatihan desain pembelajaran berbasis proyek, penilaian autentik, serta pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran kolaboratif.

Kedua, pemerataan infrastruktur dan sumber daya pendidikan menjadi kunci keberhasilan implementasi kurikulum, khususnya di daerah tertinggal. Temuan Dewi (2021) tentang ketimpangan hasil belajar antardaerah mengisyaratkan bahwa desentralisasi tanpa disertai alokasi sumber daya yang memadai justru memperparah kesenjangan. Pemerintah perlu memperluas kebijakan afirmatif seperti program Guru Penggerak dengan memberikan insentif khusus bagi guru di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Selain

itu, kolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi nirlaba dapat diperkuat untuk menyediakan akses internet, perangkat teknologi, dan bahan ajar yang memadai bagi sekolah-sekolah di wilayah marginal.

Ketiga, sistem evaluasi kurikulum harus dikembangkan secara holistik dan adaptif. Penghapusan Ujian Nasional (UN) dalam Kurikulum Merdeka perlu diimbangi dengan sistem pemantauan yang tidak hanya mengukur capaian akademik, tetapi juga perkembangan keterampilan nonkognitif seperti kreativitas, kolaborasi, dan karakter siswa. Sebagaimana diusulkan Simarmata dan Mayuni (2023), asesmen formatif berbasis proyek dan portofolio dapat menjadi alternatif untuk menangkap kemajuan belajar siswa secara lebih komprehensif. Selain itu, mekanisme umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua harus diintegrasikan dalam siklus evaluasi untuk memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan pembelajaran di tingkat mikro.

Terakhir, stabilitas kebijakan dan koordinasi antarlembaga menjadi fondasi agar reformasi kurikulum tidak terjebak pada perubahan kosmetik. Resistensi terhadap Kurikulum

Merdeka sebagian besar bersumber dari inkonsistensi kebijakan pendidikan yang sering berubah seiring pergantian pemangku kepentingan (Simarmata & Mayuni, 2023). Pemerintah perlu membangun kerangka regulasi yang menjamin kesinambungan kurikulum, sambil tetap memungkinkan ruang bagi inovasi lokal. Sinergi antara Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas pendidikan harus diperkuat melalui forum konsultasi berkala, sehingga kebijakan kurikulum tidak hanya top-down tetapi juga responsif terhadap tantangan di lapangan. Dengan pendekatan ini, transformasi kurikulum dapat benar-benar mewujudkan tujuan pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

E. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya melibatkan revisi dokumen kebijakan, tetapi juga transformasi dalam praktik pembelajaran, peran guru, serta sistem dukungan institusional. Secara global, perubahan kurikulum cenderung diarahkan pada penguatan

kompetensi abad ke-21, sebagaimana diungkapkan oleh Voogt dan Pelgrum (2005), namun implementasinya masih sering terhambat oleh kesenjangan antara rancangan kurikulum dan pelaksanaannya. Di Indonesia, upaya reformasi melalui Kurikulum Merdeka sebagaimana dibahas oleh Simarmata dan Mayuni (2023), memberikan peluang bagi pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Namun, seperti yang diuraikan oleh Dewi (2021), pelaksanaan kurikulum dalam kerangka desentralisasi belum memberikan hasil yang optimal terhadap capaian belajar siswa, terutama akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah.

Temuan ini menegaskan bahwa reformasi kurikulum di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, yang tidak hanya fokus pada pembaruan isi kurikulum, tetapi juga memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan keselarasan antarunsur dalam proses pendidikan. Kurikulum yang baik harus didukung oleh sistem pelatihan guru yang kuat, mekanisme evaluasi

yang adaptif, dan keterlibatan aktif komunitas sekolah dalam proses implementasi.

Saran

Pertama, pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan perlu memperkuat pelatihan dan pendampingan bagi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur. Kedua, perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga formatif dan reflektif terhadap praktik pembelajaran yang sesungguhnya terjadi di kelas. Ketiga, dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah harus diberdayakan secara kelembagaan dan finansial agar mampu menjalankan fungsi manajemen pendidikan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Terakhir, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari reformasi kurikulum terhadap hasil belajar siswa dan perubahan budaya belajar di sekolah.

Daftar Pustaka

- Bray, M. (1996). *Decentralization of education: Community financing*. World Bank.
- Dewi, A. U. (2021). Curriculum reform in the decentralization of education in Indonesia: Effect on students' achievements. *Cakrawala Pendidikan*, 40(1), 158–167.
<https://doi.org/10.21831/cp.v40i1.33821>
- Simarmata, H. A., & Mayuni, I. (2023). Curriculum reform in Indonesia: From competency-based to freedom of learning. *International Journal of Pedagogical Novelty*, 2(2), 1–13.
<https://jurnal.pustakagalerimandi.co.id/index.php/IJOPNOV/article/view/109>
- Kuiper, & U. Hameyer (Eds.), *Curriculum landscapes and trends* (pp. 1–10). Springer.
- Tyler, R. W. (1949). *Basic principles of curriculum and instruction*. University of Chicago Press.
- Van den Akker, J. (2003). Curriculum perspectives: An introduction. In J. van den Akker, W.
- Voogt, J., & Pelgrum, H. (2005). ICT and curriculum change. *Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments*, 1(2), 157–175.
<https://doi.org/10.17011/ht/urn.2005356>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.